

# EFEKTIVITAS KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 17 PEKANBARU

**Andika Saputra Siregar**

**Email : che.dika85@gmail.com**

**Dibimbing oleh Drs. H. Chalid Sahuri, MS**

Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

## **ABSTRACT**

The purpose of this research is: 1) determine the quality of education at Junior High School 17, Pekanbaru, and 2) determine the role of the school committee in improving the quality of education at Junior High School 17 Pekanbaru. Research by the author is using a qualitative approach. In the course of collecting data, the writer used interview, observation, and documentation. As for the analysis, the writer uses descriptive qualitative analysis techniques, the data in the form of written or spoken of observed behavior and so in this case the author seeks to conduct research that is thoroughly describe the actual state of affairs.

The results of this study are: First, the quality of education at Junior High School 17 Pekanbaru can be quite good, this can be seen in terms of input, process and output. Second, the role of school committees in improving the quality of education at Junior High School 17 Pekanbaru, including: 1) As consideration giver (advisory agency): SMP Negeri 17 Pekanbaru Committee as the principal partner has given consideration in any plans and programs prepared by the schools, for example in terms of rehab facilities and buildings damaged, widen mushalla, procurement of equipment prayer (mukenah and gloves). In addition, the school committee also provided input and consideration in setting RAPBS, giving consideration in the implementation process of the management of education in schools and identify the educational resources available in the community for consideration and seconded at school. 2) As a supporter (supporting agency): the role of the school committee as a subsidiary body for implementation and improving the quality of education, especially education in SMP Negeri 17 Pekanbaru is the form of financial support, personnel, and support the mind. 3) As a control (controlling agency): SMP school committee in 17 Pekanbaru exercise control over decision making and planning education in schools, in addition to the allocation of funds and resources for the implementation of programs in schools. The school committee also perform control functions to the success of education in schools is seen from the quality of educational output. 4) as a mediator (executive agency): School Committee SMP Negeri 17 Pekanbaru in these many benefits, which in the presence of the school committee, the aspirations of the students and parents can be channeled and represented. In addition, the school has always had the support of the school committee in order to continue to improve the quality of education.

Keywords: Effectiveness, School Committee, Quality of Education

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebuah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia tidak pernah berhenti dan selesai. Berbagai konsep dan wawasan baru akan terus berproses seiring dengan berkembangnya

pengetahuan dan teknologi. Konsep dan wawasan baru itu diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu bersaing secara global. Dengan demikian persoalan peningkatan mutu pendidikan sangat perlu di kaji dan diperjuangkan. Untuk merealisasikan

perjuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan maka perlu adanya pembenahan dari segi sumber daya manusianya, lembagapenyelenggara pendidikannya seperti SD,SMP/ MTs, SMA/SMK, dan perguruan tinggi dan semuanya itu perlu didukung oleh sumber daya pendidik yang layak. Sumber daya pendidikan itu antara lain: tenaga ahli atau guru, manajemen, kurikulum, sarana dan prasarana, serta dana yang diadakan dan didayagunakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama.

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. Dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), peran serta dan dukungan masyarakat baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan. Untuk menampung peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan, maka dibentuklah Komite Sekolah.

Keberadaan Komite Sekolah ini telah mengacu kepada Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat sekolah. Amanat rakyat dalam Undang-undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang dewan pendidikan dan Komite Sekolah.

Dalam Lampiran II: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah, dinyatakan bahwa keberadaan Komite Sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, kemudian sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, dan terakhir sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Adapun tujuan Komite Sekolah yaitu 1). mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; 2). meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan 3). Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu di satuan pendidikan.

Berdasarkan keputusan Mendiknas tersebut, Komite Sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan

efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan dewan pendidikan dan Komite Sekolah memang dipandang strategis sebagai wahana untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Beberapa kalangan masyarakat serta pakar dan pengamat pendidikan yang diundang untuk memberikan masukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pada umumnya sangat antusias dan mendukung sepenuhnya gagasan pembentukan dewan pendidikan dan Komite Sekolah.

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat, sekolah harus bisa membina kerja sama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama. Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan. SMP Negeri 17 Pekanbaru merupakan salah satu sekolah penyelenggaraan pendidikan yang menyikapi dengan serius permasalahan pendidikan terutama yang menyangkut masalah peningkatan mutu pendidikan di provinsi Riau khususnya di Kota Pekanbaru. Sekolah ini dalam menyikapi permasalahan tersebut tidaklah bekerja sendiri, namun SMP Negeri 17 Pekanbaru mengikutsertakan pihak Komite Sekolah sebagai partner kerjanya. Langkah ini diambil karena pihak lembaga menyadari

bahwa berfikir, berbuat dan bekerja akan lebih baik jika dilakukan dengan bersama stakeholders.

Dengan berasumsi bahwa pendidikan merupakan masalah semua pihak terutama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka pihak SMP Negeri 17 Pekanbaru berusaha seoptimal mungkin memberdayakan dan mengikutsertakan keterlibatan Komite Sekolah dalam segala jenis usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar. Hal ini dimaksudkan, agar semua elemen masyarakat dapat ikut serta dalam menyukseskan pendidikan putra-putrinya dengan mutu yang lebih baik. Karena itu juga, hal ini sebagai bagian dari respon terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam beberapa Undang-undang dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang terkait dengan pengikutsertaan masyarakat dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang perlu dirumuskan adalah sebagai berikut: "Bagaimana peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 17 Pekanbaru ?"

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berpijak dari pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara umum sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mutu pendidikan di SMP Negeri 17 Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 17 Pekanbaru.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

- b. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi para pembaca, pengajar, dan para pihak yang berkecimpung dalam lembaga pendidikan pada umumnya serta bagi penulis khususnya agar menyadari betapa pentingnya peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

#### D. Konsep Teori

Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dengan efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi adalah tingkat sejauhmana organisasi mampu merealisasikan tujuannya dengan menggunakan segenap sumber daya dan sarana yang ada. Dengan kata lain efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya sebuah organisasi mencapai tujuannya. Apabila sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan secara efektif.

Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian secara nyata menurut **Stoner** dalam **Nogi (2005:138)**, menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi.

Selanjutnya menurut **Druker** dalam **Mitra (2010:28)**, mendefinisikan efektivitas adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*). Dari kedua pengertian di atas dikemukakan **Druker** tersebut, maka jelaslah perbedaan antara efektivitas dengan efisiensi. Sedangkan **Lockwood** memberikan pengertian analisis efektivitas yaitu analisis mutu output dari suatu pelatihan standar.

Menurut **Handoko (2001:7)**, efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan. Selanjutnya efektivitas menurut **Sumaryadi (2005:105)** adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauhmana seseorang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan lainnya.

**Lipham** dan **Hoeh** dalam **Mulyasa (2002: 83)**, mengemukakan efektivitas merupakan suatu kegiatan dari faktor pencapaian tujuan yang memandang bahwa efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan pribadi. Suatu organisasi dan lembaga dikatakan efektif meskipun individu yang ada di dalamnya dapat dipenuhi. Menurut **Kamisa** dalam **Mitra (2010:29)**, efektivitas berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, membawa hasil). Kemudian **Ahadi** dalam **Mitra (2010:30)**, mengatakan bahwa efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Selanjutnya **Sigit** dalam **Mitra (2010:30)**, mendefinisikan efektivitas adalah suatu kontinum yang merentang dari efektif, kurang efektif, sedang-sedang, sangat kurang, sampai tidak efektif.

Organisasi yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dapat meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan pelayanan dengan memuaskan kebutuhan pelanggan. Jadi secara umum ada pandangan bahwa efektivitas dimaksudkan atau didefinisikan dalam batas-batas pencapaian tujuan. Dengan demikian diartikan bahwa sejauhmana tujuan yang sudah ditetapkan dapat merealisasikannya dalam pencapaian hasil.

Selanjutnya **Etzioni** dalam **Hessel (2005:138)**, dikatakan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat sejauhmana organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-

tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya. Jadi secara umum ada pandangan bahwa efektivitas dimaksudkan atau dapat didefinisikan dalam batas-batas pencapaian tujuan organisasi. Kemudian **Siliss** dalam **Nogi (2005:139)**, menyatakan efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan, dan pemanfaatan tenaga manusia. Selanjutnya menurut **Nogi (2005:138)**, suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat sejauhmana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap aktifitas yang dilaksanakan oleh organisasi adalah untuk mencapai hasil yang maksimal atau secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan efektivitas pelaksanaan pekerjaan. Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat sejauhmana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 17 Pekanbaru yang berada di jalan Pembangunan No. 75 B Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. SMP Negeri 17 Pekanbaru merupakan salah satu lembaga pendidikan negeri milik pemerintah yang diberi kewenangan untuk membentuk Komite Sekolah sebagai mitra dalam menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan (sekolah) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

### **2. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan pada peneliti. Informan adalah suatu istilah yang memberikan pengertian kepada subjek yang

bertugas memberikan data dalam bentuk informasi kepada peneliti. Informan dapat juga dikatakan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan, memahami dan berpengalaman yang lebih mengenai objek penelitian yang akan diteliti. Informan penelitian sangat penting dalam penelitian ini karena merupakan objek informasi tentang efektivitas komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 17 Pekanbaru. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data, informan penelitiannya adalah warga sekolah di SMP Negeri 17 Pekanbaru, seperti Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Pekanbaru, Ketua Komite, guru dan pegawai SMP Negeri 17 Pekanbaru.

Adapun *key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, ketua komite sekolah, guru/ pegawai dan orang tua siswa SMP Negeri 17 Pekanbaru. Dalam penelitian ini, keempat *key informan* tersebut dijadikan sebagai pangkal informan. Dalam menentukan informan selanjutnya ini ditentukan dengan metode *snowball sampling* atau bola salju, yaitu suatu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel pertama-tama dipilih satu atau dua orang dengan sengaja, tetapi karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel menjadi banyak (Sugiono,2007). Sehingga jumlah informan ini tidak bisa diketahui sebelum penelitian, jumlah informan akan diketahui setelah penelitian selesai dilakukan.

### **3. Jenis dan sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti,

adapun data tersebut menyangkut kriteria-kriteria untuk mengetahui efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 17 Pekanbaru.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan-laporan, literatur-literatur data yang berkaitan dengan SMP Negeri 17 Pekanbaru, yang meliputi jumlah anggota Komite Sekolah, tugas dan fungsi, struktur organisasi Komite Sekolah SMP Negeri 17 Pekanbaru dan sebagainya.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Observasi yaitu pengamatan yang bertujuan mengenali berbagai rupa kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan yang memola dari hari ke hari ditengah masyarakat mana yang lazim atau tidak lazim. Kegiatan observasi tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi juga terhadap apa yang terdengar.

#### **b. Wawancara**

Yaitu peneliti dalam teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Peneliti dalam wawancara bebas namun tetap terikat dengan pokok-pokok masalah dan tujuan penelitian (wawancara bertahap/bebas terpimpin). Adapun Informan penelitian antara lain Kepala Sekolah, Komite Sekolah, guru dan orang tua siswa.

#### **c. Observasi**

Yaitu pengamatan langsung oleh penulis dilapangan atau lokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan

didalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengamati fenomena sosial dan gejala yang ada dilokasi penelitian, untuk mendukung keabsahan data dari apa yang telah dan akan di observasi.

#### **d. Studi kepustakaan dan Dokumentasi**

Yaitu teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa aturan lembaga, laporan rapat, foto, dokumen lembaga, buku-buku maupun penelitian terdahulu, bulletin atau berita-berita yang disiarkan ke media massa yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mutu Pendidikan di SMP Negeri 17 Pekanbaru**

Dalam rangka mengetahui efisiensi eksternal SMPN 17 Pekanbaru, penulis merujuk kepada program-program pendidikan, terutama program yang bersifat praktek, baik program rutin maupun program ekstra kurikuler yang diberikan kepada siswa SMPN 17 Pekanbaru. Program praktek yang tercakup dalam daftar pelajaran adalah pelajaran olah raga, pelajaran Komputer, Agama dan Kesenian. Pada program-program tersebut, siswa diberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat diaplikasikan dan dimanfaatkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kutipan wawancara penulis dengan salah satu guru Komputer di SMPN 17 Pekanbaru

*“Pada dasarnya ilmu yang kami berikan kepada siswa pada mata pelajaran komputer ini merupakan bekal keterampilan yang nantinya dapat aplikasikan dan dimanfaatkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, bahkan termasuk juga dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas mata pelajaran yang lain.”*

(Wawancara : Mei, 2014)

Di samping itu, indikator mutu pendidikan dari aspek efisiensi eksternal juga dapat dilihat dari seberapa banyak

siswa lulusan SMPN 17 Pekanbaru yang diterima di SMU/ sederajat negeri. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pihak, baik pihak sekolah, maupun pihak orang tua siswa, penulis mendapatkan informasi bahwa pada umumnya siswa lulusan SMPN 17 Pekanbaru dapat diterima atau dapat melanjutkan studinya di SMU/ sederajat negeri. Hal ini disebabkan karena SMPN Negeri 17 Pekanbaru merupakan salah satu SMPN favorit atau SMPN yang memiliki banyak prestasi, baik dari segi guru maupun siswa-siswanya. Berikut kutipan wawancara penulis dengan salah satu orang tua siswa :

*“Kemaren anak saya yang sekolah di SMPN 17 Pekanbaru ini dua orang, satu baru tamat tahun 2013 kemaren, dan yang satunya lagi baru kelas delapan. Alhamdulillah anak saya yang tamat kemaren diterima di SMUN 8 Pekanbaru. SMU itu termasuk SMU favorit di Pekanbaru. Kata anak saya lumayan banyak mereka yang diterima di sana. Sehingga dia di sana tidak terlalu merasa asing.”*

(Wawancara : Mei, 2014)

Efektivitas pendidikan menggambarkan tingkat kesesuaian antara jumlah keluaran yang dihasilkan dengan jumlah yang ditargetkan. Sementara produktifitas pendidikan merupakan ukuran mengenai tingkat daya hasil suatu program dalam satuan waktu tertentu (Makmun 2007: 42).

Adapun indikator yang disebut terakhir, kesehatan institusi pendidikan pada dasarnya menunjukkan tingkat kepuasan, kekuatan motivasi, dan derajat keterlibatan dewan guru dalam pengambilan keputusan. Sedangkan semangat berinovasi berkaitan dengan tingkat kepekaan dan ketanggapan terhadap perubahan perkembangan dan tantangan yang terjadi di lingkungannya serta kemampuan dan kemauan untuk melakukan penyesuaian melalui upaya-upaya perbaikan, penyempurnaan, dan pembaharuan.

Pada tingkat yang lebih teknik operasional, kualitas proses pendidikan dapat ditelaah dengan indikator keberhasilan sekolah dasar sebagaimana yang dirinci oleh Depdikbud (1997) yang meliputi nama komponen, jumlah subkomponen, dan jumlah keberhasilan sekolah dasar yang dimaksud terperinci sebagai berikut: 1) ketercapaian tujuan pendidikan, 3 subkomponen dan 12 indikator; 2) organisasi dan manajemen, 4 dan 17; 3) tenaga kependidikan (guru), 2 dan 8; 4) kegiatan belajar mengajar, 4 dan 14; 5) lingkungan sekolah, 6 dan 16; 6) pengembangan sarana dan prasarana, 6 dan 15; 7) kesiswaan, 3 dan 8; 8) hubungan kerja sama sekolah 1 subkomponen dan 5 indikator. Komponen-komponen tersebut dituangkan dalam penilaian akreditasi sekolah yang menjadi indikator mutu pendidikan suatu sekolah. Pada tahun 2013, SMP Negeri 17 Pekanbaru berhasil mendapatkan nilai akreditasi sekolah dengan predikat B (baik). Dan saat ini SMP Negeri 17 Pekanbaru sudah mulai mempersiapkan diri untuk mendapatkan predikat A untuk akreditasi sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan di SMP Negeri 17 Pekanbaru dapat dikatakan baik dan akan terus mengalami peningkatan.

## 2. Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 17 Pekanbaru

Pada umumnya, setiap lembaga pendidikan merupakan suatu institusi yang memposisikan diri-dengan meminjam istilah dalam dunia manajemen sebagai industri jasa, yaitu institusi yang memberikan pelayanan (*service*) sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Pelayanan atau jasa yang diberikan sudah barang tentu harus berupa sesuatu yang bermutu, yang bisa memberikan kepuasan kepada *customers* (pelanggan). Secara sederhana pelanggan (*customers*) institusi pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu *internal customer* dan *external customer*. *Internal customer* adalah pengelola

institusi pendidikan itu sendiri, yaitu kepala sekolah sebagai *manager* sekaligus *leader*, guru dan karyawan. Sedangkan *external customer* adalah masyarakat, pemerintah dan dunia industri. Suatu institusi pendidikan dikatakan bermutu, apabila kedua *customer* tersebut telah terjalin kepuasan atas jasa yang telah diberikan oleh institusi pendidikan terkait. *Internal customer* berposisi sebagai pihak yang memberi pelayanan dan merasa terpuaskan atas pelayanan yang diberikan. Sedangkan *external customer* adalah sebagai pihak yang terpuaskan mendapat pelayanan dari *Internal customer*.

Untuk inilah, maka institusi pendidikan membutuhkan suatu system (manajemen) pengelolaan yang mampu memberdayakan institusi pendidikan agar lebih bermutu dan mampu memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik *Internal customer* maupun *external customer*.

Kelangsungan hidup suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat pelanggan (orang tua, siswa, dan *stakeholder*) terhadap lembaga pendidikan tersebut. Dukungan pelanggan tersebut juga tergantung apakah kebutuhan dan keinginannya dapat dipenuhi dan dipuaskan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Komite sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh komite sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi *transparan*, *akuntabel*, dan *demokratis* dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Agar komite sekolah dapat

berdaya, maka dalam pembentukan pengurus pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola secara benar pula. Komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara *akuntabel* bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak DR. H. Abdullah Hasan, MSc selaku ketua komite sekolah, beliau menyatakan bahwa :

*“Mekanisme pembentukan komite sekolah di SMP Negeri 17 Pekanbaru ini terlebih dahulu kita mengundang beberapa orang diantaranya yaitu: tokoh masyarakat sekitar, alumni, wali murid-wali murid yang dianggap berpotensi, setelah mereka yang diundang datang, lalu kita mengadakan rapat/musyawarah, kemudian diadakan pemilihan.”*

(Wawancara: April 2014)

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Drs. Almunir Syafe'i selaku sekretaris komite sekolah di SMP Negeri 17 Pekanbaru, sebagai berikut:

*“Mekanisme pemilihan/pembentukan anggota dan pengurus komite sekolah di SMP Negeri 17 Pekanbaru ini dilakukan secara musyawarah, untuk pemilihannya biasanya dilakukan 4 tahun sekali. Pada waktu pemilihan, sekolah mengundang wali murid yang puteranya masih dikelas VII jadi baru masuk. Dan ada juga sebagian wali murid yang lama supaya tidak terputus hubungannya. Disana ada aturannya dari wali murid murni dan ada wali murid yang sekaligus menjabat sebagai guru disini, alumni dan stakeholder. Jadi orang-orang yang*



*berperan di sekitar kita yang mendukung, kita undang beberapa orang itu kemudian dari orang-orang yang hadir itu kita mengadakan musyawarah, kemudian kita pemilihan. Sebelumnya kita undang beberapa orang calon, dari yang datang kita musyawarahkan apa yang diinginkan secara pemilihannya setelah itu kita adakan pemilihannya, dan ada pernyataan kesanggupan.”*  
(Wawancara : April, 2014)

Lebih lanjut dikemukakan pula oleh Ibu Hertuti Rais, S.Pd, selaku bendahara komite sekolah, sebagai berikut:

*“Adapun mekanisme pembentukan komite sekolah di sekolah ini, pertama-tama kita memilih wali siswa yang diharapkan peduli dengan kondisi sekolah. Jadi wali siswa yang setidaknya dia itu mengetahui, bukan wali siswa yang awam sekali. Dan diharapkan sesekali punya waktu untuk datang ke sekolah. Kemudian mereka diundang dan pada saat itu diadakan pemilihan komite sekolah secara foting.”*  
(Wawancara : April, 2014)

Sebagaimana pernyataan diatas, SMP Negeri 17 Pekanbaru telah melaksanakan pembentukan/ pemilihan anggota dan pengurus komite sekolah yang mengacu pada tata cara pembentukan yang demokratis, seperti yang tertulis dalam SK. Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam tentang prinsip pembentukan komite sekolah, yaitu : *transparansi, akuntabilitas,* dan demokratis, serta merupakan mitra satuan pendidikan.

Secara formal, hampir semua sekolah telah memiliki perangkat komite sekolah sebagai wakil masyarakat dalam membantu program pendidikan di sekolah. Kehadiran komite sekolah telah menunjukkan sahamnya sebagai mitra sekolah, terutama bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan, baik program pembangunan fisik maupun non fisik.

Adapun peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan diantaranya yaitu:

#### **a. Sebagai Pemberi Pertimbangan (*advisory Agency*)**

Komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan bagi sekolah memiliki arti, bahwa komite sekolah dipandang sebagai mitra kerja kepala sekolah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan sekolah. Melalui komite sekolah, orang tua dan masyarakat dapat ikut merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah.

Selama ini keberadaan komite sekolah sangat berarti sekali bagi setiap satuan pendidikan. Karena komite sekolah itu merupakan pembantu utama satuan pendidikan dalam memakmurkan pendidikan sekolah (lembaga pendidikan) selain masyarakat internal sekolah. Segala macam program yang akan dilaksanakan sekolah sebaiknya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite sekolah. Sebab, segala macam kebijakan yang akan diterapkan ataupun yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat internal maupun eksternal sekolah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ade Armi, M.Pd selaku kepala SMP Negeri 17 Pekanbaru beliau menyatakan bahwa :

*“Komite sekolah memberi pertimbangan khususnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, misalnya dalam hal pengadaan peralatan drum band dan rencana pembangunan laboratorium, sebelum sekolah mengambil keputusan, maka terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite sekolah. Maka terjadilah diskusi dan masukan-masukan dari komite sekolah kepada pihak sekolah.”*

(Wawancara : April, 2014).

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Drs. Almunir Syafe'i selaku sekretaris komite sekolah di SMP Negeri 17 Pekanbaru, sebagai berikut :

*“Komite sekolah sebagai mitra kerja kepala sekolah dapat memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah, misalnya sekolah akan mengajukan rehab sarana dan gedung yang rusak, sekolah akan melakukan pelebaran mushalla, rencana pembangunan laboratorium dan lain-lain, maka pihak sekolah terlebih dahulu mengkonsultasikan masalah itu kepada komite sekolah agar dapat diberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah. Dan atas nama masyarakat yang diwakilinya, komite sekolah dapat menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap rencana dan program pendidikan yang disusun oleh sekolah.”*

(Wawancara : Mei, 2014).

Selain daripada itu, posisi komite sekolah sebagai pemberi pertimbanganpun masih berlanjut pada pemberian masukan dan pertimbangan dalam hal rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan, kriteria tenaga kependidikan, dan kriteria fasilitas pendidikan. Sebagaimana yang peneliti temukan di lapangan dari hasil wawancara dengan ketua komite SMP Negeri 17 Pekanbaru yang menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 17 Pekanbaru, keterlibatan komite sekolah bersifat menyeluruh, mulai dari pemberian masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, pemberi pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diperbantukan di sekolah. berikut hasil wawancaranya :

*“Sebagai badan yang memberikan pertimbangan atau nasihat, komite sekolah di SMP Negeri 17 Pekanbaru*

*dalam fungsi perencanaan pendidikan memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) termasuk dalam penyelenggaraan rapat-rapat RAPBS”.*  
(Wawancara : Mei, 2014).

Dalam pengelolaan terhadap sumber daya pendidikan, antara lain : sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan alokasi anggaran, komite sekolah berperan mengidentifikasi berbagai potensi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. Fungsi ini akan dapat berguna dalam memberikan pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan yang dapat dipertimbangkan dan diperbantukan di sekolah.

Hal senada diungkapkan pula Ibu Yuliasuti Emil, S.Pd selaku guru bidang studi di SMPN 17 Pekanbaru sebagai berikut:

*“Dalam pelaksanaan program, yang menyangkut: kurikulum, silabus, PBM (Proses Belajar Mengajar), dan penilaian, komite SMP Negeri 17 Pekanbaru sebagai badan penasihat berperan penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk pembelajarannya.”*

(Wawancara : Mei, 2014)

#### **b. Sebagai Pendukung (Supporting Agency)**

Peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan pemecahan masalah kekurangan guru, biaya sekolah bagi anak kurang mampu, dan tenaga untuk ikut memperbaiki sekolah yang rusak. Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada

masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan dewan pendidikan.

Peran pendukung yang dipegang oleh komite sekolah tidak hanya sebatas memberikan dorongan dan motivasi saja, namun lebih dari itu. Dengan berperan sebagai *supporting agency* ini, komite sekolah diharapkan dapat mendorong dan menyadarkan para orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Karena pendidikan khususnya lembaga (satuan) pendidikan tidak akan dapat berperan sebagaimana fungsinya sebagai lembaga pembentuk generasi beradab dan berpengetahuan tanpa mendapat dukungan besar dari masyarakat luas (*stakeholders*).

Pada dasarnya pendidikan yang baik membutuhkan penyediaan sarana prasarana yang memadai, ruang belajar yang cukup, serta biaya yang banyak. Akan tetapi selama ini anggaran yang terdapat di sekolah sangat terbatas, oleh karena itu dalam hal ini masyarakat diharapkan menjadi penanggung jawab dan donatur yang memberikan dana demi kelancaran kegiatan pendidikan di sekolah. Masyarakat yang berminat dan bersimpati dapat memberikan bantuannya melalui berbagai cara, misalnya: membantu penyediaan alat peraga, buku-buku, serta memberikan biaya kepada anak didik yang kurang mampu atau bahkan menjadi orang tua asuh.

Komite sekolah sangat membantu kemandirian sekolah dalam hal anggaran, fasilitas sekolah yang masih kurang, mencarikan dana untuk menambah insentif guru, dengan mengajukan bantuan dana tanpa memberatkan orang tua siswa. Anggaran itu diperoleh dari upaya anggota komite sekolah sendiri atau melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti alumni sekolah. Orang tua siswa yang mengetahui adanya kekurangan-kekurangan di sekolah dapat memberikan bantuan keuangan atau barang-barang, baik secara perorangan maupun lembaga.

Selain fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat

terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam hal ini komite sekolah juga berperan dalam penggalangan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan. sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala SMP Negeri 17 Pekanbaru sebagai berikut :

*“Komite sekolah mempunyai peran yang sangat mendukung dan baik sekali mulai dari sarana dan prasarana, manajemen pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua siswa. Misalnya dalam pengembangan fisik sekolah, komite sekolah melakukan serangkaian kegiatan dari perencanaan, penggalian dana, pelaksanaan sampai pelaporan.”*

(Wawancara : Mei, 2014)

Komite sekolah juga ikut membantu dalam menunjang sarana dan prasarana sekolah terutama untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Drs. Almunir Syafe'i selaku sekretaris komite sekolah di SMP Negeri 17 Pekanbaru, beliau menyatakan bahwa:

*“Komite sekolah peranannya sangat mendukung khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan agama Islam, misalnya setiap hari besar Islam komite sekolah selalu ikut andil dalam acara tersebut, dengan mengadakan lomba-lomba Islami, misalnya pidato, puisi kaligrafi, peragaan busana muslim, tartil dan qiro'ah, adzan, dan lain-lain. Tidak hanya itu, komite sekolah juga membantu pengadaan alat-alat shalat seperti: mukenah dan sarung yang ada di mushalla, kan pada hari-hari biasa siswa-siswi banyak yang tidak membawa mukenah dan sarung tapi sekarang di mushalla sudah ada dan itu hasil dari kerjasama dengan komite sekolah melalui iuran rutin”.*

(Wawancara : Mei, 2014)

Hal senada diungkapkan pula oleh Ibu Hertuti Rais, S.Pd selaku bendahara komite sekolah, mengatakan bahwa:

Dalam hal sarana dan prasarana komite sekolah ikut memberi dukungan dan bantuan dalam pelebaran mushalla,

pengadaan alat shalatnya, membantu kelancaran air wudhu ketika sumurnya mati, memperluas tempat wudhu, dan lain-lain. Komite sekolah juga tidak hanya memberikan dukungan dalam pengadaan sarana dan prasarana fisik saja, namun termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak DR. H. Abdullah Hasan, M.Sc, sebagai berikut :

*“Selain membantu dalam masalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah, komite sekolah juga membantu mengembangkan sumber daya manusianya, yakni dengan memberikan sumbangan saran dan motivasi agar para guru senantiasa dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga sekolah bisa menjadi lebih maju lagi dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain.”*

(Wawancara : Mei 2014).

### c. Sebagai Pengontrol (*controlling agency*)

Peran komite sekolah selanjutnya adalah sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah. Peran pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah meliputi kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah. Komite sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu *output* pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam. Berikut ini hasil wawancara dengan kepala SMP Negeri 17 Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa :

*“Peran komite sekolah di SMP Negeri 17 ini dalam hal controlling agency yang bertindak sebagai pengawas atau pengontrol. Yaitu dalam hal keuangan dan jalannya proses belajar-mengajar.”*

(Wawancara : Mei 2014)

Hal senada diungkapkan pula oleh Bapak DR. H. Abdullah Hasan, MSc selaku ketua komite sekolah, sebagai berikut :

*“Kalau masalah kontrol, saya setiap bulan mengontrol pengeluaran keuangan sekolah sekaligus transparansi penggunaan alokasi dana agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, saya juga mengontrol jalannya proses belajar-mengajar peserta didik SMP Negeri 17 Pekanbaru ini.”*

(Wawancara : Mei 2014)

Begitu juga sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Hertuti Rais, S.Pd, selaku bendahara komite sekolah yang mengungkapkan bahwa peran *controlling agency* yang diemban oleh komite sekolah tidak hanya terbatas pada finansial saja, melainkan dalam urusan pengambilan keputusan dan pengembangan fasilitas. Berikut hasil wawancaranya :

*“Sebagai badan pengontrol, komite sekolah melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan di sekolah dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan program sekolah, maupun dalam pengembangan dan penambahan fasilitas sekolah, misalnya: penambahan buku-buku, dan kaset-kaset yang berhubungan dengan mata pelajaran yang ada di perpustakaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.”*

(Wawancara : Mei 2014)

Hal senada diungkapkan pula oleh Drs. Almunir Syafe'i selaku sekretaris komite sekolah di SMP Negeri 17 Pekanbaru sebagai berikut :

*“Dalam hal pengawasan atau kontrol, komite sekolah biasanya melakukan pengawasan langsung ke pelaksanaan pendidikan, misalnya : mengamati dari siswanya dan laporan hasil belajarnya. Di samping itu, komite sekolah juga mengontrol program penyelenggaraan pendidikan di sekolah seperti*

*pengembangan silabus, bahan ajar dan lain-lain.*"

(Wawancara : Mei 2014)

Peran *controlling* ini juga dimaksudkan agar komite sekolah sebagai partner sekolah dan masyarakat memberikan *service* yang memuaskan, terlebih yang berhubungan dengan *input* dan *output* yang dihasilkan sekolah. Karena sistem sekolah berada di tengah-tengah masyarakat, maka antara *input* dan *output* pun yang dihasilkan sekolah harus dapat diterima oleh masyarakat sebagai pengguna.

#### **d. Sebagai Mediator (*executive agency*)**

Komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite sekolah untuk disampaikan kepada sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan, dan keluhan orang tua dan masyarakat.

Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Komite sekolah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah sehingga dapat *akuntabel* (dipertanggungjawabkan) kepada masyarakat.

Bagi komite sekolah peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada orang tua siswa bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah. Dalam operasionalnya, komite sekolah sebagai mediator ini lebih banyak untuk ditujukan dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat, menampung serta menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Kerjasama dengan masyarakat ini sangat mutlak untuk dilakukan sebab sekolah adalah sebuah sistem yang berada di tengah-

tengah masyarakat, hidup dan mati lembaga pendidikan tergantung dari peran serta masyarakat. Begitu juga halnya, dalam setiap menjalankan programnya sekolah maupun komite sekolah senantiasa meminta bantuan kepada masyarakat.

Komite sekolah juga berperan menyerap dan menganalisis aspirasi ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat, baik masyarakat internal sekolah maupun eksternal sekolah. Bagi masyarakat internal sekolah (guru, karyawan, dan siswa) keberadaan komite sekolah dengan peran dan fungsinya sebagai mediator ini memberikan *support* bagi masyarakat internal sekolah itu sendiri, apalagi komite sekolah siap menampung segala keluhan kesah yang dicurahkan untuk dibicarakan bersama jajaran pimpinan sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. Almunir Syafe'i selaku sekretaris komite sekolah di SMP Negeri 17 Pekanbaru sebagai berikut :

*"Keberadaan komite sekolah di SMP Negeri 17 ini banyak memberi manfaat, yang mana dengan adanya komite sekolah maka aspirasi siswa dan orang tua dapat tersalurkan dan terwakilkan, selain itu pihak sekolah juga selalu mendapat support dari komite sekolah agar terus dapat meningkatkan mutu pendidikan."*

(Wawancara : Mei 2014)

Sesuai dengan peranannya sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat, komite sekolah berusaha untuk memberikan pengarah dan keterangan yang jelas mengenai kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat bahwa pemerintah selalu melakukan upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya.

Dari Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran yang telah dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan mutu

pendidikan di SMP Negeri 17 Pekanbaru cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kepedulian komite sekolah terutama orang tua siswa untuk membantu, menunjang dan ikut serta demi kelancaran dan pengembangan pendidikan.

## KESIMPULAN

1. Mutu pendidikan di SMP Negeri 17 Pekanbaru dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari segi *input*, proses dan *outputnya*. Dari segi *input*, siswa-siswi SMP Negeri 17 Pekanbaru mempunyai motivasi untuk selalu meningkatkan diri dalam berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya, para guru, staf, TU, konselor dan administrator yang mempunyai keahlian dibidangnya dan juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Adapun dari segi *outputnya*, siswa lulusannya sebagian besar diterima di SMA Negeri unggulan di Kota Pekanbaru.

2. Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 17 Pekanbaru.

a. Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), komite SMP Negeri 17 Pekanbaru sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah, misalnya dalam hal rehab sarana dan gedung yang rusak, melakukan pelebaran mushalla, pengadaan peralatan shalat (mukenah dan sarung). Selain itu, komite sekolah juga memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dapat dipertimbangkan dan diperbantukan di sekolah.

b. Sebagai badan pendukung (*supporting agency*), peran komite sekolah sebagai

badan pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam di SMP Negeri 17 Pekanbaru berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran.

c. Sebagai badan pengontrol (*controlling agency*), komite sekolah di SMP Negeri 17 Pekanbaru melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah. Komite sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu *output* pendidikan.

d. Sebagai badan mediator (*executive agency*), keberadaan komite sekolah di SMP Negeri 17 Pekanbaru ini banyak memberi manfaat, yang mana dengan adanya komite sekolah maka aspirasi siswa dan orang tua dapat tersalurkan dan terwakilkan. Selain itu pihak sekolah juga selalu mendapat *support* dari komite sekolah agar terus dapat meningkatkan mutu pendidikan.

## B. Saran-saran

1. Agar komite sekolah bisa lebih berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 17 Pekanbaru, maka hendaknya komite sekolah lebih meningkatkan hubungan kerja sama baik dengan guru, orang tua siswa, maupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya, agar tercipta sikap toleransi dan saling mendukung dalam tujuan yang sama yaitu meningkatkan mutu pendidikan.
2. Peran komite sekolah harus lebih dioptimalkan lagi, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan atau transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan agar lebih dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga peningkatan mutu pendidikan semakin memungkinkan, disebabkan lahirnya ide-ide cemerlang dan kreatif semua pihak (*stakeholder*) pendidikan yang bersangkutan.
3. Komite sekolah dan pihak sekolah sendiri diharapkan dapat mencari terobosan baru yang dapat menggali dan menghasilkan

dana untuk menunjang keberhasilan program peningkatan mutu pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anatan, Lina dan Ellitan, Lena. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Bisnis Modern*. Bandung: Alfabeta.
- Depdiknas. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah* (Buku 1). Jakarta : Depdiknas.
- Depdiknas. 2001. *Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Depdikbud.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Konsep Dasar*, Jakarta : Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Hessel, Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irianto, Jusuf. 2001. *Tema-Tema Pokok Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Insan Cendikia.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tentang *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*.
- Mitra, Ariadi. 2010. *Efektifitas Program Pada Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Riau*. Pekanbaru.
- Nurkholis, 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Patria, Sutopo, 2001, *Keefektifan Organisasi*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, mencabut Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- Prabu, Anwar . 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Robbins, Stephen P.2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- , Jusuf Udaya,1994. *Teori Organisasi:Struktur, Desain & Aplikasi*, Edisi 3, Arcan, Jakarta, 1994, hal.52-85.
- Siagian, Sondang P.2003. *Filsafat Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- 1995.*Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, M Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sastrapoera, Komarudin. 2001. *Asas-Asas Manajemen Perkantoran*. Bandung: Kappa Sigma.
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Soenarya, Endang. 2000. *Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendidikan Sistem*. Yogyakarta : Adi Cita Karya Nusa.
- Suderadjat, Hari, 2005. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah ; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*, Bandung: Cipta Lekas Grafika.
- Umaedi. 1999. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta : Depdiknas.
- Usman, Husaini. 2006.*Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-Undang RI, Nomor 20, 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*.Semarang : Aneka Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*: Sinar Grafika.